

**SOP REVIU  
LAPORAN KEUANGAN (LK)**



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG  
Jl. Adi Sucipto No. 3012  
Sukarami – 30155, Palembang  
Telp. 0711-410930  
Fax. 0711-420385

## **DAFTAR ISI**

- 1. TUJUAN**
- 2. RUANG LINGKUP**
- 3. DEFINISI**
- 4. DASAR HUKUM / REFERENSI**
- 5. KETERKAITAN**
- 6. PERINGATAN**
- 7. KUALIFIKASI PELAKSANA**
- 8. PERALATAN**

## **1. TUJUAN**

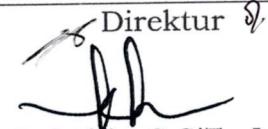
Prosedur ini bertujuan menjelaskan proses reviu atas laporan keuangan agar infomasi laporan keuangan yang disajikan andal, akurat, absah dan berkualitas.

## **2. RUANG LINGKUP**

Lingkup prosedur ini mulai dari proses penyusunan tim reviu LK, menerima surat perintah pelaksanaan reviu terhadap format penyelenggaraan akuntansi dan mekanisme penyusunan dan substansi laporan keuangan, penyusunan KKR dan penyusunan LHR.

## **3. DEFINISI**

- a. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
- b. Reviu adalah penelaahan atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

 <p>POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG</p>	Nomor SOP	:	009 / SOP / SP1 / 08 / 2023
	Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023
	Tgl. Revisi	:	-
	Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023
	Disahkan oleh	:	<p style="text-align: right;">Direktur</p>  <p>Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001</p>

#### Reviu Laporan Keuangan (LK)

Dasar Hukum:	Cara mengatasi:
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusutan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas pemerintah Pusat</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pusat;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2016 Tentang</li> </ol>	<p>Cara mengatasi:</p> <p>Berkoordinasi dengan pimpinan manajemen terkait pelaksanaan program tahunan reviu laporan keuangan di politeknik penerbangan Palembang.</p>

<p>Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Pusat;</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN;</p> <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum</p> <p>12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;</p> <p>13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 144 Tahun 2019 Tentang Satuan Peneriksaan Intern Pada Badan Layanan Umum</p>	
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan LK</li> <li>2. Data Dukung LK</li> </ol>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Akses internet</li> <li>5. Laporan keuangan Politeknik Penerbangan Palembang</li> </ol>
<p>Peringatan</p> <p>Apabila SOP reviu Laporan keuangan Politeknik Penerbangan tidak dilaksanakan penjaminan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah di politeknik penerbangan Palembang dipertanyakan.</p>	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Pengelola Keuangan	Tim Reviu	Kepala SPI	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan LK dan dokumen pendukung lainnya untuk dilakukan reviu						Draft LK dan dokumen pendukung lainnya	15 menit	Draft LK dan dokumen pendukung lainnya	-
2.	Koordinasi untuk melakukan reviu dan menyusun konsep susunan Tim reviu						Draft LK dan dokumen pendukung lainnya	30 menit	Arahan melakukan reviu dan menyusun konsep susunan Tim reviu	-
3.	Membuat konsep susunan Tim reviu						Konsep susunan tim reviu	1 Jam	Konsep susunan tim reviu	-
4.	Menyampaikan konsep surat tugas tim reviu LK						Konsep pelaksanaan reviu dan susunan tim reviu	1 Hari	Draft ST pelaksanaan reviu LK	-
5.	Menerima, menyetujui dan membubuhkan tandatangan						Draft ST pelaksanaan reviu LK	2 Hari	ST pelaksanaan reviu LK	-
6.	Melakukan reviu terhadap Laporan keuangan Poltekbang Palembang terkait format, mekanisme penyusunan dan substansi						LK dan dokumen pendukung lainnya serta Program kerja reviu	5 Hari	Kertas kerja reviu	-

7.	Mencatat hasil reviu atas seluruh informasi baik bersumber dari dokumen maupun hasil wawancara Pada KKR dan formulir checklist reviu					LK dan dokumen pendukung lainnya, formulir checklist reviu serta Kertas kerja reviu	1 Hari	Formulir checklist reviu serta Kertas kerja reviu	-
8.	Menyusun berita acara hasil reviu dalam bentuk CHR dan Pernyataan telah direviu					CHR dan Pernyataan telah direviu	1 Hari	CHR dan Pernyataan telah direviu	-
9.	Menyampaikan berita acara hasil reviu dalam bentuk CHR dan Pernyataan telah direviu					CHR dan Pernyataan telah direviu	30 menit	CHR dan Pernyataan telah direviu	-
10.	Menyusun draft LHR					Catata hasil reviu	1 Hari	Laporan Hasil reviu	-
11.	Menyampaikan LHR kepada Kepala SPI					Laporan Hasil reviu	15 menit	Laporan Hasil reviu	-
12.	Menyampaikan Laporan Hasil Reviu kepada Pimpinan BLU					Laporan Hasil reviu	30 menit	Laporan Hasil reviu	-

```

graph TD
    A[7] --> B[8]
    B --> C[9]
    C --> D[10]
    D --> E[11]
    E --> F[12]
    F --> G[Selesai]
  
```